

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2021 Tentang Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Endang Sulastri ¹⁾; Yulius Yohanes ²⁾; Rupita ³⁾

^{1,2,3)} *Master's Program in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak*

Email: ¹⁾ e207223103@student.untan.ac.id ;²⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id

³⁾ rupita@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Juli 2025]
Revised [20 Januari 2026]
Accepted [22 Januari 2026]

KEYWORDS

Policy Implementation, Minister of Health Regulation, Childbirth.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 tentang Persalinan di Puskesmas Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan persalinan di puskesmas dan memastikan keselamatan ibu serta bayi melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kecamatan Ngabang merupakan wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur, yang berpotensi memengaruhi implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada tenaga kesehatan, kepala puskesmas, dan masyarakat, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga medis terlatih dan terbatasnya fasilitas, kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan persalinan. Namun, implementasi masih memerlukan perbaikan dalam hal pelatihan tenaga medis, pengadaan fasilitas yang memadai, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya yang lebih maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan pelayanan persalinan yang aman dan berkualitas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Minister of Health Regulation No. 21 of 2021 on Childbirth at the Ngabang Health Center, Landak Regency. This regulation is designed to improve the quality of childbirth services at health centers and ensure the safety of mothers and babies through the established procedures. Ngabang, being a border region, faces geographical and infrastructure challenges, which may affect the implementation of this policy. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with healthcare workers, the head of the health center, and the local community, as well as direct field observations. The results show that despite several challenges, such as the lack of trained medical personnel and limited facilities, this policy has had a positive impact on the quality of childbirth services. However, implementation still requires improvements in medical staff training, provision of adequate facilities, and increased community involvement. This study recommends further efforts to maximize support for policy implementation to achieve the goal of safe and quality childbirth services.

PENDAHULUAN

Pada UUD 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap warga Negara oleh sebab itu pemerintah melalui dinas kesehatan dengan berbagai programnya berusaha menyediakan berbagai fasilitas baik sarana maupun sumberdaya untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan agar tercipta masyarakat yang sehat serta mandiri. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mendefinisikan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis. Sumberdaya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk meyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut data Depertemen Kesehatan jumlah balita yang menderita malnutrisi di Indonesia adalah 4,2 juta jiwa, sebanyak 3,38 juta jiwa berstatus kurang gizi dan 755 ribu termasuk resiko gizi buruk. (Harian Republika, Kamis 12 maret 2009) Tingginya angka malnutrisi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor namun penyebab yang dominan adalah disebabkan oleh kemiskinan yang menyebabkan orang tua terpaksa tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi maupun balitanya, faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesehatan dan pertumbuhan bayi dan balita tidak dikontrol secara baik sehingga gejala gizi buruk dan kurang gizi tidak dapat dicegah sedini mungkin.

Berdasarkan hasil survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2023 angka kematian bayi (AKB) masih sangat tinggi yaitu sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu (AKI) pada saat melahirkan 228 per 100 ribu kelahiran hidup sedangkan berdasarkan target millennium development goals (MDGs) pada tahun 2015 angka kematian bayi harus dapat diturunkan menjadi 24

per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu menjadi 118 perkelahiran hidup. Salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas yang terhindar dari gizi buruk maupun kurang gizi adalah melalui kegiatan puskesmas selain itu kegiatan puskesmas juga dimaksudkan untuk menekan angka kematian ibu serta bayi dengan melakukan kontrol kesehatan melalui kegiatan puskesmas yang dilaksanakan setiap bulannya. Hanya saja yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah program puskesmas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan cenderung banyak yang tutup karena berbagai alasan baik kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut maupun alasan kurangnya sumberdaya serta sarana dan prasarana yang di perlukan dalam kegiatan puskesmas. Untuk meningkatkan kegiatan puskesmas kembali pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor : 441.3.1116/SJ. Tanggal 13 juni tahun 2001 tentang pedoman umum Kebijakan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2023 tentang Persalinan Aman yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia untuk melaksanakan persalinan yaitu mengaktifkan kembali fungsi utama dari puskesmas, yang merupakan pembaharuan dari Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ Tanggal 3 Maret 1999 tentang persalinan di puskesmas sebelumnya. Persalinan di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja puskesmas terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita. Tujuan pokok kegiatan persalinan meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kemampuan ketrampilan kader.
- b. Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan puskesmas.
- c. Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat dan obat di puskesmas.
- d. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk ke sinambungan puskesmas.
- e. Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan puskesmas.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Landak terdapat 384 kegiatan puskesmas yang dilaksanakan oleh puskesmas, pokesdes dan pustu yang tersebar diKecamatann dan desa yang berada di Kabupaten Landak, salah satu puskesmas yang melaksanakan Kebijakan peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 tentang Persalinan adalah Puskesmas Ngabang yang berada di Kecamatan Ngabang , Kabupaten Landak.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Landak tahun 2023 terdapat 4.122 bayi termasuk balita yang terdapat di Kecamatan Ngabang , yang mengikuti kegiatan puskesmas sebanyak 2.891 bayi termasuk balita sedangkan yang tidak mengikuti kegiatan puskesmas sebanyak 1. 231 balita. Sementara itu ibu hamil pada tahun 2023 sebanyak 719 orang yang rutin mengikuti kegiatan puskesmas sebanyak 532 orang dan yang tidak mengikuti kegiatan puskesmas sebanyak 187 orang, kemudian angka kematian ibu yang tercatat pada puskesmas Ngabang sebanyak 2 kasus dari 416 kelahiran hidup dan angka kematian bayi serta balita sebanyak 22 kasus dari 436 kelahiran hidup dan kasus gizi buruk terdapat 154 kasus bayi termasuk balita. (Puskesmas Ngabang 2023).

Berkaitan dengan angka kematian ibu, bayi dan balita serta masalah gizi buruk yang masih terjadi diKecamatann Ngabang sesuai dengan data yang ada pada puskesmas Ngabang maka penulis merasa permasalahan tersebut penting dan perlu untuk dilakukan penelitian terutama sekali yang berkaitan dengan implementasi kebijakan persalinan di puskesmas pada puskesmas Ngabang Kecamatan ketungau gengah kabupaten Landak. Agar dari hasil penelitian tersebut dapat di berikan kesimpulan-kesimpulan serta berbagai rekomendasi yang mungkin di butuhkan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Pendapat Edward (dalam Leo Agustin, 2006:149) pada dasarnya menilai bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil bukan hanya dilihat dari tercapainya target suatu program yang diinginkan, tetapi juga apakah sasaran atau implementasi kebijakan berhasil. Edward mengemukakan ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni :

1. Communication (Komunikasi)

Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kebijakan (elarity), menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa, mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2. Resources (Sumber Daya)

Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan sumber-sumber yang penting di antaranya adalah staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mentedemahkan usulan-usulan di atas kertas guns melaksanakan usulan publik.

3. Disposition (Kecenderungan Sikap atau Tingkah Laku)
Kecenderungan di sini adalah kecenderungan daripada pelaksana kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap, suatu pelaksanaan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan, dan sebaliknya, bila tingkah lake atau perspektif-perspektif para pelaksanaan berbeda dengan para. pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit.
4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)
Birokrasi merupakan salah sate badan pelaksana kebijakan, di mans menurut Edwards ada dua unsur penting dalam birokrasi yaitu yang berkaitan dengan prosedur kerja . ukuran-ukuran dasar dan fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Faisal (1995:18) penelitian deskriptif “digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang”. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi serta analisis atau pengolahan data. Secara sederhana, menurut faisal (1995) dapat dikatakan penelitian deskriptif “dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial”. Memperhatikan pendapat tersebut, maka terdapat paling tidak dua langkah penelitian yang harus ditempuh oleh peneliti. Kedua langkah tersebut adalah :

- a. Studi kepustakaan (library study). Langkah ini penulis lakukan sudah sejak awal dengan menghimpun sebanyak mungkin konsep-konsep yang berkaitan dengan topikatau masalah penelitian. Langkah ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan memikirkan kembali temuan-temuan dari hasil penelitian serta membaca berbagai literatur dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Studi lapangan (Field Research). Penelitian lapangan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dengan berbekal instrumen penelitian. Sasaran lapangan yang dituju adalah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Studi lapangan ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data primer (data pokok yang digali langsung dari informan atau sumber pertama) dan data sekunder (data yang digali dari sumber kedua atau memanfaatkan data yang telah tersedia sebelum penelitian ini dilaksanakan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa implementasi kebijakan persalinan di Puskesmas Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah menunjukkan struktur pelayanan yang komprehensif dengan penerapan sistem 5 meja, Standard Operating Procedures (SOP) yang jelas meliputi pemantauan balita dengan target 80% balita naik beratnya dan pelayanan gizi dengan cakupan 90% balita mendapat kapsul Vitamin A, serta program pelatihan kader yang berkelanjutan dilaksanakan dua kali setiap tahun dengan materi yang dititikberatkan pada keterampilan teknis dan dedikasi kader, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek komunikasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Puskesmas telah memiliki paket pelayanan yang beragam mulai dari Program Pengembangan Anak Dini Usia (PADU) yang terintegrasi dengan Program Bina Keluarga Balita (BKB), program Dana Sehat/JPKM, hingga program diversifikasi pertanian dan kegiatan ekonomis produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana dasar seperti timbangan bayi, kartu KMS, pita LILA, dan obat-obatan berupa Vitamin A dan tablet Fe, keberhasilan implementasi kebijakan masih sangat bergantung pada optimalisasi komunikasi pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan dukungan tokoh masyarakat seperti Kepala Desa dan kader-kader desa.

Pembahasan

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Sasaran kegiatan Puskesmas ini pada dasarnya meliputi seluruh Puskesmas dengan prioritas utama pada Puskesmas Pratama dan Amdya sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka mencapai tujuan Persalinan di puskesmas ada beberapa strategi yang harus ditempuh yaitu: Meningkatkan kemampuan dengan meningkatkan ketrampilan teknis, serta dedikasi kader Puskesmas. Memperluas sistem Puskesmas dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah. Menciptakan iklim kondusif untuk pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Puskesmas. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kegiatan Puskesmas. Menyediakan sistem pilihan jenis dalam pelayanan PMT (Pemberian

Makanan Tambahan) sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Menggunakan azas kecukupan dan urgensi dalam penetapan sasaran pelayanan dengan perhatian khusus pada Baduta dan Balita untuk mencapai cakupan keseluruhan. Memperkuat dukungan pembinaan dan pendampingan teknis bagi tenaga professional dan tokoh masyarakat, termasuk unsur LSM (Lembaga Swadaya masyarakat).

Salah satu dari unsur penting yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik atau swasta. Sedangkan apa yang menjadi unsur penting yang lainnya dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan persalinan di puskesmas ini, struktur birokrasi di dalam Puskesmas Kecamatan Ngabang terdiri dari staf-staf/ unit-unit Puskesmas yang mempunyai program dan fungsi kerja masing-masing dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun yang menjadi *Standard Operating Procedures* atau SPO Puskesmas Kecamatan Ngabang antara lain : 1) Pemantauan Balita; Balita yang naik beratnya sebesar 80 %, Balita bawa garis merah atau BGM sebesar 15 %. 2) Pelayanan Gizi; Cakupan balita mendapat kapsul Vit. A 2 kali setahun sebesar 90 %; Cakupan pemberian MP ASI pada BGM dari keluarga miskin (gakin) sebesar 100 %.; Cakupan Bumil mendapat FE sebesar 9 %; Kecamatan Bebas Rawan Pangan sebesar 80 %. Prosedur-prosedur kerja di atas lah yang menjadi ukuran dasar dalam pelaksanaan kegiatan persalinan di puskesmas ini. Prosedur-prosedur di atas dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak Puskesmas.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Pelayanan Puskesmas pada hari buka dilaksanakan dengan menggunakan 5 tahapan layanan yang biasa disebut sistem 5 meja, Tanpa mengurangi arti kelompok sasaran yang selama ini dilayani, yakni 3 (tiga) kelompok rawan yaitu anak-anak Bawah Dua Tahun (Baduta), anak-anak Bawah Lima Tahun (Balita), Ibu hamil dan Ibu menyusui. Jenis pelayanan yang minimal perlu diberikan kepada anak (Balita dan baduta), adalah :

- 1) Penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, perhatian harus diberikan secara khusus terhadap anak yang selama 3 kali penimbangan pertumbuhannya tidak cukup naik sesuai umunya (lebih rendah dari 200 gram/bulan) dan anak yang pertumbuhan berada di bawah garis merah KMS (Kartu Menuju Sehat).
- 2) Pemberian Makanan Pendamping ASI dan Vit. A dua kali setahun.
- 3) Pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya (kurang dari 200 gram/bulan) dan anak yang berat badannya berada di bawah garis merah (BGM) KMS.
- 4) Memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layu.
- 5) Memantau kejadian ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan Diare, serta melakukan rujukan bila diperlukan.

Dari hasil wawancara dengan PLKB Kecamatan bahwa paket pelayanan pengembangan atau pilihan, adalah paket layanan yang dapat ditambahkan atau dikembangkan bagi Puskesmas yang mapan. Paket kegiatan pilihan ini merupakan perluasan kegiatan Puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/kelompok sasaran di daerah, yang meliputi tambahan berbagai program, antara lain :

- a) Program Pengembangan Anak Dini Usia (PADU) yang diintegrasikan dengan Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan kelompok bermain lainnya.
- b) Program Dana Sehat/atau JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) dan sejenisnya, seperti Tabungan Ibu Besalin (TABULIN), Tagungan Masyarakat (TABUMAS) dan sebagainya.
- c) Program Penyuluhan penanggulangan penyakit endemis setempat seperti malaria, demam berdarah (DBD), gondok endemic dan lain-lain.
- d) Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLB).
- e) Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD).
- f) Program Diversifikasi Pertanian Tanaman Pangan.
- g) Program sarana air minum dan jamban keluarga (SAMIJAGA) dan perbaikan lingkungan pemukiman.
- h) Pemanfaatan pekarangan.
- i) Kegiatan ekoomis produktif, seperti usaha simpan pinjam dan lain-lainya.
- j) Kegiatan lainnya seperti: Tempat Pengajian Anak (TPA), Pengajian, Taman Bermain, Arisan, Peragaan Teknologi Tempat Guna dan sejenisnya.

Faktor Sikap pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Sebagai unit pelayanan yang berbasis masyarakat, Puskesmas perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat melalui peran sertanya agar kegiatan Puskesmas dapat berkelanjutan dan

jangkauannya meluas sesuai kebutuhan kelompok sasaran yang dilayaninya. Hasil wawancara kader Puskesmas menyatakan bahwa peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan Puskesmas dapat dilakukan melalui: Pembentukan suatu lembaga atau unit pengelola Puskesmas di desa yang anggotanya dipilih dari masyarakat, dengantugas untuk mengelola secara professional penyelenggaraan puskesmas, termasuk memperhatikan masalah ketenagaan, sarana dan pembiayaan bagi kelangsungan Puskesmas yang bersumber dari masyarakat.

Mengoptimalkan kegiatan Puskesmas dengan cara memenuhi sarana dan prasarannya, sehingga Puskesmas dapat berlangsung secara optimal, baik saat hari buka maupun saat kujungan rumah tanpa mengalami hambatan. Sarana dasar seperti timbangan bayi, timbangan dewasa, kartu ZKMS, pita LILA (Lingkaran Lengan Atas), alat peragaan memasak, bahan KIF(komunikasi, Informasi dan Edukasi), obat-obatan berupa Vit. A, tablet dan siruf Fe. Kapsul iodium, obat cacing, oralit, ATK dan format SIP untuk menunjang kegiatan pelayanan, minimal dan paket tambahan sesuai jumlah kelompok sasaran yang ditetapkan, merupakan syarat dasar untuk berfungsinya Puskesmas secara baik.

Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Persalinan Di Puskesmas Keamatan Ngabang Kabupaten Landak

Hasil wawancara dengan Kader Puskesmas bahwa kegiatan puskesmas yang dilaksanakan di Puskesmas , Kecamatan Ngabang dilakukan setiap bulan sekali disesuaikan dengan tanggal kunjungan yang telah ditetapkan di setiap desa di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Ngabang. Dengan adanya jadwal kegiatan puskesmas yang telah ditetapkan kemudian dipasang di papan pengumuman Puskesmas Kecamatan Ngabang diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Ngabang ini, agar masyarakat selalu datang dan berpartisipasi terhadap kegiatan puskesmas ini. Kemudian pihak pelaksana Puskesmas , menyatakan bahwa keterlibatan kepada tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, serta Kader-kader yang ditugaskan di setiap desa untuk menginformasikan kegiatan puskesmas ini secara jelas kepada masyarakat desa tersebut. Pihak pelaksana Puskesmas Kec. Landak telah melakukan komunikasi secara optimal tentang adanya kegiatan ini. Namun, berhasil tidaknya kegiatan puskesmas ini disesuaikan kembali kepada keikutsertaan atau partisipasi tokoh masyarakat dan masyarakat desa setempat dalam kegiatan puskesmas ini.

Implementasi kebijakan persalinan di puskesmas ini akan berjalan baik sesuai dengan apa yang diharapkan apabila terjalin komunikasi yang baik antara pihak pelaksana kebijakan dengan masyarakat (kelompok sasaran). Adanya dukungan dan keikutsertaan /partisipasi masyarakat dalam kegiatan puskesmas ini sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya pelaksanaan persalinan di puskesmas ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan persalinan di puskesmas di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak menunjukkan bahwa: pada dasarnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas , Kecamatan Ngabang selaku pelaksana kebijakan terkait dengan kegiatan persalinan di puskesmas di Kecamatan Ngabang sudah optimal. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Puskesmas , Kecamatan Ngabang dalam memberikan informasi mengenai kegiatan puskesmas ini kepada masyarakat. Namun, berhasil atau tidaknya kegiatan persalinan di puskesmas ini tergantung daripada dukungan dan partisipasi masyarakat setempat. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan persalinan di puskesmas, maka kegiatan ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat.
2. Sumberdaya dalam pelayanan Ibu hamil dan Ibu menyusui yang diberikan oleh Puskesmas , Kecamatan Ngabang dengan kader Puskesmas dari 958 jumlah Ibu hamil yang ada di Kecamatan Ngabang wilayah kerja Puskesmas , hanya 849 Ibu hamil atau 89% yang melakukan kunjungan pada pemeriksaan kehamilan yang ke 1 dan 738 Ibu hamil yang melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan yang ke 4. Kemudian dari 914 jumlah ibu yang melakukan persalinan hanya 556 Ibu bersalin yang ditolong atau menggunakan bantuan tenaga kesehatan Puskesmas , Kecamatan Ngabang.
3. Sikap pelaksana dalam pemberian penghargaan kepada kader berupa dana hibah atau pinjaman modal usaha bagi kader yang kinerjanya baik sebagai suatu perangsang agar terus tekun dalam menjalankan tugasnya. sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kader. Pemberian bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan puskesmas yang bersumber dari dana masyarakat, seperti zakat dan sumbangan keagamaan yang sejenis, maupun pemberian bantuan sarana dasar untuk pelaksanaan fungsi pokok Puskesmas.

4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan persalinan di puskesmas di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak menunjukkan bahwa: pada dasarnya struktur birokrasi dari Puskesmas, Kecamatan Ngabang dalam pelaksanaan persalinan di puskesmas di Kecamatan Ngabang sudah cukup baik. Adanya pembagian fungsi dan tugas masing-masing staf atau unit dalam pelaksanaan persalinan di puskesmas ini. Setiap staf/unit berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut. Hanya saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan prosedur-prosedur kerja kegiatan puskesmas ini adalah kurangnya / kecilnya dana yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat untuk pembiayaan kegiatan puskesmas ini. Dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kegiatan persalinan di puskesmas.

Saran

Pada bagian akhir penulisan tesis ini penulis ingin mengajukan beberapa asaran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan persalinan di puskesmas di Kecamatan Ngabang Kabupaten Sitang supaya lebih optimal. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas, Kecamatan Ngabang selaku pelaksana kebijakan persalinan di puskesmas diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan puskesmas ini dan bersikap mandiri atau dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dana yang ada/tersedia untuk pelaksanaan kegiatan puskesmas ini.
2. Pemerintah Daerah setempat diharapkan dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemberian bantuan pembiayaan/dana untuk kegiatan puskesmas ini.
3. Pihak swasta, LSM dan Lembaga lainnya diharapkan dapat memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam pemberian bantuan baik materiil maupun moral dalam rangka kegiatan puskesmas ini.
4. Pada masyarakat setempat diharapkan dapat memberikan dukungan melalui peran sertanya agar kegiatan Puskesmas dapat berkelanjutan dan jangkauannya semakin meluas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program kesehatan khususnya persalinan Program Poyandu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.
- Ating Tedjasutisna, Nanang Yusuf Nurdin dan Euis Sumpriana, 1999. Administrasi Kantor 2A SMK, Bandung: Armico.
- Departemen Kesehatan RI, 2002., ARRIME Pedoman Manajemen Puskesmas, Proyek Kesehatan Keluarga dan Gizi, Jakarta.
- Dunn, N William, 2000., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, M Irfan, 2001., Seri Policy Analysis, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Nugroho D, Riant, 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT. Gramedia.
- _____, 2009., Publik Policy (Edisi Revisi), Jakarta: PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia.
- Putra, Fadillah, 2004., Partai Politik & Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG., 2005., Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan, Darwim, 2002., Menjadi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2008., Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- , 2006, Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2000., Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2007., Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Media Pressindo.
- Yuwono, Abdulkahar Badjuri dan Teguh, 2003., Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Persada.
- Surat edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Persalinan di puskesmas.
- Laporan Prevelensi status Gizi Balita PUSKESMAS, Kec. Ngabang Tahun 2009, Harian Republika, 12 Maret 2009, Memutuskan Rantai Gizi Buruk.